

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG
EKSPOR PRODUK KELOR UMKM
(STUDI KASUS UPAYA DAPUR ARU EKSPOR)**

Oleh : Jihan Nabila Fahmi

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.IntRel

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the national economy by contributing 61% of total GDP and absorbing 97% of Indonesia's total workforce. Various efforts are made to empower MSMEs including export-oriented MSMEs. MSME empowerment is carried out by the central government and local governments in accordance with Law No. 20/2008. Empowerment is carried out because there are several obstacles in MSME exports. One of the regional MSMEs that has successfully exported officially is PT Mond Nature Lestari (Dapur Aru) after receiving assistance and empowerment from various parties.

This research uses a qualitative method, by collecting primary data by interviewing MSMEs and government institutions and secondary data from several books, journal articles and websites. This research uses the theoretical framework of the role of government in encouraging MSMEs to export.

This paper shows that the role of government in encouraging MSMEs to export has a division at each administrative level. The central government and local governments have their respective roles where the local government prepares and the central government processes. This research indicates that the Dapur Aru export process is assisted by the Riau Province Office of Trade, Industry, Cooperatives and SMEs. The Dapur Aru export process is a combination of central and regional empowerment programs. The use of the theoretical framework of the role of government in encouraging export MSMEs to the export process is correlative to the resolution of export constraints faced by MSMEs.

Keywords: Government Role, Export, MSME Empowerment

PENDAHULUAN

Ekonomi global selalu didefinisikan sebagai interaksi pasar antara aktor-aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Namun, dewasa ini Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) mulai ikut dalam aktivitas ekonomi global dengan menjadi salah satu agen ekspor dan impor dalam rantai perdagangan internasional. Bergabungnya UMKM dalam rantai perdagangan internasional merupakan jawaban dari adanya peningkatan permintaan produk dan jasa.

Di Indonesia, usaha yang masuk kategori kelompok UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana UMKM merupakan usaha dengan nilai aset dan omzet tahunan tertentu. UMKM merupakan salah satu sektor penopang utama perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61%, dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.¹ Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku

usaha di Indonesia pada tahun 2017, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit.²

Kontribusinya terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja menunjukkan peran vital UMKM dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Ekspor berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu pemerintah Indonesia mendorong ekspor UMKM. Indonesia memiliki UMKM yang berpotensi besar dalam melakukan ekspor, tahun 2022 UMKM menyumbang 16,65% dari total ekspor Indonesia.³ Meski demikian, berdasarkan data *Bank Asian Development*, nilai ekspor UMKM Indonesia masih lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang secara jumlah unit UMKMinya berada dibawah Indonesia, UMKM Indonesia yang menembus pasar global hanya 5,5% dari total UMKM pada tahun 2020. Padahal UMKM merupakan penopang perekonomian negara yang dapat menjangkau berbagai kalangan.

Rendahnya ekspor UMKM disebabkan adanya beberapa kendala

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia," Pub. L. No. HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 (2021), <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/UMKM-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

² Hanif, Zulkarnain, and Eka Armis Pailis, "Analisis Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran Dan Inovasi UMKM Binaan KPw Bank Indonesia Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 6, no. 1 (2022): 89–103, <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.521>.

³ Amelya Juwitasari, "Refleksi 2022 Dan Outlook 2023, Kemenkop UKM Ungkap Pencapaian Dan Rencana Untuk Pelaku UMKM," ukmindonesia.id, 2023, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-program/refleksi-2022-dan-outlook-2023-kemenkop-ukm-ungkap-pencapaian-dan-rencana-untuk-pelaku-UMKM>.

yang dihadapi UMKM yang ingin ekspor seperti regulasi, kargo, *business matching*, dan keberlanjutan. Maka dari itu perlu adanya bantuan dari berbagai pihak terutama pemerintah. Dengan sistem ekonomi desentralisasi, upaya dalam mendorong ekspor UMKM tidak hanya dilakukan pemerintah pusat. Ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat.

Provinsi Riau termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam ekspor. Pada tahun 2021 Provinsi Riau memiliki nilai ekspor tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Timur.⁴ Provinsi Riau memiliki sejumlah UMKM berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Siddhakarta Awards tahun 2020 oleh enam UMKM Riau.⁵

Menyadari potensi besar yang dimiliki UMKM Riau untuk ekspor serta melihat pertumbuhan ekonomi yang diciptakan UMKM maka pemerintah daerah menaruh perhatian dalam upaya mendorong UMKM ekspor, terutama dalam hal pelatihan dan pendampingan. Pelatihan yang diberikan berupa edukasi yang dimulai dengan pengupayaan UMKM naik kelas dimana UMKM dibina dari sisi pra-produksi,

produksi, pasca-produksi hingga strategi pemasaran.

Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong ekspor UMKM dengan objek penelitian salah satu UMKM di Provinsi Riau yang melakukan ekspor ke Malaysia. Malaysia menjadi pilihan bagi banyak UMKM Riau dalam melakukan ekspor, begitupun sebaliknya, banyak produk Malaysia yang beredar di tengah masyarakat Riau. Salah satu UMKM di Provinsi Riau yang melakukan ekspor ini adalah Dapur Aru. Dapur Aru memiliki rumah produksi di Jalan Lukman, Gg. Sepakat, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau.

Beberapa produk hasil produksi Dapur Aru, diantaranya kopi kelor, kelor tubruk, daun kelor celup, tepung kelor, cokelat kelor, abon ikan patin kelor, sabun kelor. Pada tahun 2023, Dapur Aru berhasil secara resmi melakukan ekspor langsung yang tercatat di bea cukai ke Malaysia. Produk yang di ekspor adalah kelor tubruk, yakni daun kelor yang telah diolah dan dikeringkan sehingga kadar air dalam daun kelor berkurang. Dalam proses ekspornya, Dapur Aru tidaklah berdiri sendiri.

⁴ Raja Adil Siregar, "Riau Jadi Provinsi Kedua Yang Paling Banyak Ekspor, Sawit Jadi Andalan," *finance.detik.com*, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5683513/riau-jadi-provinsi-kedua-yang-paling-banyak-ekspor-sawit-jadi-andalan>.

⁵ Dewi Rizqianti, "Strategi CV.Rumah Tamadun Dalam Produk Tas Lidi Sawit Ke Amerika Serikat" (Universitas Riau, 2023).

LANDASARAN TEORI

Peran Pemerintah Dalam Mendorong UMKM Ekspor

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti kasus yang diangkat, penulis menggunakan kerangka teori Peran Pemerintah Dalam Mendorong UMKM Ekspor yang dikemukakan oleh Nguyen dkk. Nguyen dkk menguraikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan UMKM, yang dikategorikan ke dalam faktor negara dan faktor pasar. Fenomena tersebut menunjukkan perkembangan UMKM bergantung pada hubungan antara kedua sumber tersebut.

Dalam penelitiannya, Nguyen dkk juga melihat pola yang sama pada beberapa negara di Asia Tenggara Seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Setelah membaca poin-poin yang ditulis Nguyen dkk terkait faktor- faktor

METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif yaitu menerangkan keadaan dilapangan, menganalisa dan menguraikan dengan menggunakan kalimat yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶ Data dan informasi berkaitan dengan variabel akan diperoleh dengan cara mencari informasi berupa data primer dan data sekunder yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang didapat dari

yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM, adapun beberapa faktor dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM ekspor diantaranya :

Training and Development:

Negara dapat mendukung program-program yang memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan UMKM untuk sukses.

Technology and Information:

Negara dapat membantu UMKM mengadopsi teknologi baru dengan menyediakan akses ke informasi dan sumber daya.

Support Institution:

Pendirian lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pengembangan bisnis, konsultasi, dan bentuk-bentuk dukungan lainnya dapat bermanfaat bagi UMKM.

Trade and Export Promotion Policies:

Negara dapat membantu UMKM mengakses pasar baru dengan mendukung kegiatan promosi perdagangan.

data primer, yakni melalui teknik wawancara dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang menjadi objek penelitian. Data Primer akan diperoleh dengan wawancara beberapa pihak seperti:

1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Provinsi Riau, Alamat: Gedung Menara Lancang Kuning Lantai IV Komp. Kantor Gubernur Riau
2. PT. Mond Nature Lestari (Dapur Aru), Alamat: Jl. LUMKMan, Gg. Sepakat, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau

Data sekunder atau data yang diperoleh melalui dokumen yang telah diuji kebenarannya, seperti melalui studi pustaka, topik literatur, arsip di perpustakaan, artikel jurnal,

⁶ Riduan dan Akdon, *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2010).

laporan, dan sumber-sumber data lainnya. Sedangkan untuk mendukung data, data diambil melalui persediaan data yang ada di internet maupun sumber lain yang

HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor UMKM di Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar

diyakini masih mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Teknik ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif.

biasa, hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti inisiatif pemerintah, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen.

Tabel 1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unit (juta)	64,19	65,47	64	65,46	(-)	66
Growth		1,98%	-2,24%	2,28%	(-)	1,52%

Sumber: Kadin Indonesia

Bila melihat pada tabel diatas, UMKM di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 yang terdampak Covid-19. Hal ini tidak lepas dari tren utama dan faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan UMKM. Meskipun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) total ekspor Indonesia 2022 sebesar US\$291,98 miliar⁷ dan total ekspor dunia berdasarkan publikasi *World Trade Organization* (WTO) sebesar US\$ 24,2 Triliun⁸. Hal tersebut menunjukkan kontribusi ekspor Indonesia tidak lebih dari dua persen dibandingkan dengan total nilai

ekspor dunia pada tahun 2022 dan angka tersebut di dominasi oleh perusahaan raksasa terutama perusahaan padat modal.

Pemerintah Indonesia membentuk program guna mengusahakan UMKM dapat melakukan ekspor resmi sesuai regulasi ekspor dengan harapan UMKM dapat memainkan peran yang lebih luas dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan produk domestik bruto, dan pengembangan ekspor non-minyak dan gas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam proses ekspor secara resmi seperti regulasi, kargo, business matching dan keberlanjutan ekspor.

Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah pusat membuat beberapa program pemberdayaan UMKM diantaranya sebagai berikut:

⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Badan Pusat Statistik(BPS), "Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia Desember 2022," *Bps*, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/1961/ekspor-desember-2022-mencapai-us-23-83-miliar--turun-1-10-persen-dibanding-november-2022-dan-impor-desember-2022-senilai-us-19-94-miliar--naik-5-16-persen-dibanding-november-2022.html>.

⁸ World Trade Organization, "World Trade Statistical Review 2023," *World Trade Organization*, 2023.

Tabel 2. Program pemerintah pusat untuk mendorong ekspor UMKM

Training and Development	Technology and Information	Support Institution	Trade and Export Promotion Policies
Klinik Ekspor	One Single Submission	Kredit Usaha Rakyat	Small and Medium Enterprise and Cooperative
Pusat Layanan Usaha Terpadu	PaDi UMKM	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	InaEkspor
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan		Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah	Indonesia Trade Officer

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi juga memiliki peran dalam mendorong ekspor UMKM. Sebagai upaya bantuan terhadap UMKM, Pemerintah Provinsi Riau memiliki beberapa dinas yang menaungi beberapa bidang untuk mengurus terkait pemberdayaan UMKM baik UMKM yang ingin naik kelas maupun UMKM orientasi ekspor.

Pemerintah Provinsi Riau melalui DISPERINDAGKOP dan UKM memainkan peran penting dalam mendorong UMKM daerah untuk menembus pasar ekspor yakni sebagai fasilitator dan pendamping. DISPERINDAGKOP dan UKM memiliki dua bidang yang menangani ekspor UMKM yakni

bidang koperasi dan UKM yang mempersiapkan UMKM naik kelas kemudian ada bidang perdagangan yang membantu UMKM naik kelas melakukan ekspor seperti misi dagang, promosi dan lain sebagainya setelah sebelumnya dibina oleh bidang koperasi dan UKM.

DISPERINDAGKOP dan UKM memfasilitasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (UPT PLUT) sebagai bentuk *training and development* UMKM. Pemerintah provinsi menjalankan dengan baik program yang dirancang pemerintah pusat tersebut, melalui UPT PLUT pemerintah memberi kesempatan bagi UMKM untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional terutama terkait UMKM ekspor. Di UPT

PLUT, UMKM yang melapor akan mendapat pelatihan dan konsultasi terkait bisnis, legalitas dan perizinan, aspek teknis dan manajemen, sertifikasi dan standarisasi, promosi dan informasi pasar, akses pembiayaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas dan digitalisasi dan kemasan.

Sebagai *support institutions* terhadap UMKM, DISPERINDAGKOP UKM memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar yang ada di Provinsi Riau. Melalui skema ini, perusahaan besar dapat membantu UMKM dalam hal permodalan, promosi dan *business matching*. Hal ini membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sampai tahun 2023, tercatat sudah 302 UMKM di Riau yang telah dibina dan difasilitasi oleh DISPERINDAGKOP dan UKM untuk bermitra dengan perusahaan besar termasuk diantaranya bertujuan ekspor.⁹

Upaya pengembangan pasar dan promosi produk UMKM juga menjadi fokus utama bidang koperasi dan UKM. Lebih lanjut, bidang koperasi dan UKM juga menjalin kerjasama dengan pemuda Riau yang berada di luar negeri untuk mengeksplorasi peluang pasar di negara tempat mereka tinggal. Hal ini juga menjadi ajang promosi yang lebih efektif, karena akan menghemat cost perjalanan dan komunikasi dalam mengenalkan produk akan lebih mudah karena pemuda-pemuda tersebut menguasai bahasa lokal.

⁹ Fakhru Roza. "Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong ekspor UMKM" diwawancara oleh Jihan Nabiila Fahmi. Universitas Riau. 26 Maret 2024

Untuk peran pendampingan, pemerintah provinsi menjadi pendamping bagi UMKM untuk merasakan program yang dirancang pemerintah pusat. Selain pembentukan PLUT, hampir seluruh program pemerintah pusat tidak dimiliki otonomi untuk pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Dari banyaknya program pemberdayaan UMKM yang dibentuk pemerintah pusat hanya UMKM yang di dampingi pemerintah provinsi yang dapat mengakses program tersebut. Salah satu program pusat yang begitu diusahakan pemerintah provinsi untuk UMKM adalah kredit usaha rakyat (KUR), DISPERINDAGKOP dan UKM akan mendampingi seluruh proses agar UMKM mendapat manfaat dari KUR.

Selain itu, dilakukan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan lembaga yang memiliki kewenangan terkait setiap legalitas yang diperlukan. Salah satunya terkait sertifikat halal, pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan KEMENAG agar UMKM dapat mengikuti tes lab halal dan mendapatkan sertifikat secara gratis, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan berbagai dokumen legalitas lainnya.

Ekspor pertama Dapur Aru terjadi pada bulan Desember 2023. Dalam proses ekspor Dapur Aru, peran pemerintah provinsi dibagi menjadi pra dan pasca ekspor. Pra ekspor peran pemerintah provinsi sejauh mendampingi Dapur Aru dalam mengurus dokumen legalitas yang menjadi syarat ekspor. Uji laboratorium produk dan BPOM

dibantu DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi yang diperoleh dari balai besar POM Pekanbaru. Dalam menyiapkan ekspor Dapur Aru,

Sedangkan untuk pasca ekspor pertama, Dapur Aru semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Riau selalu membawa Dapur Aru dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan kementerian terkait pemberdayaan

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah provinsi Riau dalam memfasilitasi peningkatan ekspor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan kajian mendalam pada kasus keberhasilan Dapur Aru menembus pasar Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program pelatihan, penyediaan informasi pasar, serta pembentukan kemitraan strategis.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala struktural yang masih menghambat pertumbuhan ekspor UMKM secara lebih luas, seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan logistik, bertemu calon *buyer* dan menjalani ekspor yang berkelanjutan. Kasus Dapur Aru menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, khususnya dalam hal pengurusan legalitas dan pendampingan teknis.

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait merupakan kunci dalam mengatasi hambatan ekspor UMKM.

peran pemerintah provinsi dapat dikatakan minim jika dibandingkan dengan pihak lain seperti BUMN.

UMKM ekspor sampai kegiatan expo yang dapat menjadi peluang Dapur Aru meningkatkan ekspor. Hal ini sejalan dengan peran pendampingan pemerintah provinsi dalam mendorong dan membantu ekspor UMKM.

Perekonomian Indonesia bersifat desentralisasi, terdapat tingkatan wewenang dan perbedaan peran dalam pembentukan dan pelaksanaan program mendukung ekspor UMKM antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kolaborasi yang lebih erat dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap kinerja ekspor nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Dalam membina Dapur Aru periode pra ekspor, peran pemerintah Provinsi Riau tidak aktif bila mengukur pada peran pemerintah dalam mendorong UMKM ekspor yang di jabarkan Nguyen dkk. Pasca ekspor pemerintah provinsi lebih memperhatikan pengembangan usaha dan memberi peluang bagi Dapur Aru untuk mempromosikan produk Dapur Aru baik nasional maupun internasional meskipun terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia," Pub. L. No. HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/202

1, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SIARAN PERS
HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/202
1 (2021),
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/UMKM-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

Hanif, Zulkarnain, and Eka Armis Pailis, "Analisis Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran Dan Inovasi UMKM Binaan KPw Bank Indonesia Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 6, no. 1 (2022): 89–103,

Amelya Juwitasari, "Refleksi 2022 Dan Outlook 2023, Kemenkop UKM Ungkap Pencapaian Dan Rencana Untuk Pelaku UMKM," ukmindonesia.id, 2023, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-program/refleksi-2022-dan-outlook-2023-kemenkop-ukm-ungkap-pencapaian-dan-rencana-untuk-pelaku-UMKM>.

Raja Adil Siregar, "Riau Jadi Provinsi Kedua Yang Paling Banyak Ekspor, Sawit Jadi Andalan," finance.detik.com, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5683513/riau-jadi->

[provinsi-kedua-yang-paling-banyak-ekspor-sawit-jadi-andalan](#).

Dewi Rizqianti, "Strategi CV.Rumah Tamadun Dalam Produk Tas Lidi Sawit Ke Amerika Serikat" (Universitas Riau, 2023).

Riduan dan Akdon, *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Badan Pusat Statistik(BPS), "Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia Desember 2022," *Bps*, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/1961/ekspor-desember-2022-mencapai-us-23-83-miliar--turun-1-10-persen-dibanding-november-2022-dan-impor-desember-2022-senilai-us-19-94-miliar--naik-5-16-persen-dibanding-november-2022.html>.

World Trade Organization, "World Trade Statistical Review 2023," *World Trade Organization*, 2023.

Fakhrul Roza. "Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong ekspor UMKM" diwawancara oleh Jihan Nabiila fahmi. *Universitas Riau*. 26 Maret 2023.